

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 302 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIMENYAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Cimenyan untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kecamatan Cimenyan untuk periode 1 (satu) tahunan.

15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP
RENSTRA KECAMATAN CIMENYAN

Pasal 2

Dokumen Renstra Kecamatan Cimenyan merupakan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Cimenyan untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cimenyan yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Cimenyan yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Kecamatan Cimenyan bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cimenyan dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Kecamatan Cimenyan dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Kecamatan Cimenyan agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Kecamatan Cimenyan;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Cimenyan;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Kecamatan Cimenyan.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA KECAMATAN CIMENYAN

Pasal 4

(1) Renstra Kecamatan Cimenyan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kecamatan Cimenyan dalam menyusun Renja Kecamatan Cimenyan.

(2) Renstra Kecamatan Cimenyan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
   1. latar Belakang;
   2. dasar hukum penyusunan;
   3. maksud dan tujuan; dan
   4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Kecamatan Cimenyan paling sedikit memuat:
   1. gambaran pelayanan Kecamatan Cimenyan; dan
   2. permasalahan dan isu strategis Kecamatan Cimenyan.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
   1. tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Cimenyan Tahun 2025-2029;
   2. strategi Kecamatan Cimenyan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
   3. arah kebijakan Kecamatan Cimenyan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
   1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
   2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Kecamatan Cimenyan; dan
4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
1. kesimpulan;
2. kaidah pelaksanaan; dan
3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Kecamatan Cimenyan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KECAMATAN CIMENYAN

Pasal 5

(1) Kecamatan Cimenyan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Cimenyan dan evaluasi hasil Renstra Kecamatan Cimenyan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Cimenyan terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Cimenyan.

(3) Camat Cimenyan menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Kecamatan Cimenyan.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN CIMENYAN

Pasal 6

Perubahan Renstra Kecamatan Cimenyan dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Kecamatan Cimenyan mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Kecamatan Cimenyan dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Kecamatan Cimenyan, maka Renstra Kecamatan Cimenyan dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Kecamatan Cimenyan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Kecamatan Cimenyan Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Kecamatan Cimenyan terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Kecamatan Cimenyan.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.

(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 302

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 302 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIMENYAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

`

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
CIMENYAN TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut secara optimal, diperlukan penyusunan dokumen perencanaan, baik dalam jangka menengah maupun tahunan, yang dituangkan dalam Renstra dan Rencana Kerja (Renja). Renstra dan Renja Kecamatan pada dasarnya merupakan turunan dari dokumen perencanaan yang lebih tinggi, yaitu RPJMD serta RKPD.

Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewajiban kepala daerah dalam menyusun serta menetapkan Peraturan Daerah mengenai RPJMD. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 juga menegaskan bahwa RPJMD harus disusun selaras dengan RPJPD. Selain itu penyusunan Renstra Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ini juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Sinkronisasi ini diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 yang memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025–2029.

Dengan demikian, penyusunan RPJMD dan dokumen turunannya memperhatikan semangat otonomi daerah, potensi wilayah, serta kearifan lokal, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan dan kualitas pelayanan publik senantiasa terjaga.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, ada beberapa landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);

15. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati Bandung Kepada Camat;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dimaksudkan sebagai upaya merumuskan arah kebijakan pembangunan jangka menengah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun agar sejalan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih sekaligus menjadi instrumen strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Renstra Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 disusun dengan pendekatan holistik, tematik, integratif, dan berbasis spasial. Perumusan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, serta diarahkan untuk menerjemahkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung bertujuan untuk:

1. Menjadi pedoman arah pembangunan jangka menengah kecamatan selama periode lima tahun, yang selaras dengan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.
2. Menjabarkan kebijakan dan sasaran strategis daerah ke dalam program dan kegiatan kecamatan yang lebih operasional.
3. Menjamin keterpaduan perencanaan pembangunan kecamatan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya, seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

`

4. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah, sumber daya, serta kearifan lokal guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
5. Menjadi instrumen pengendalian, evaluasi, dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Cimenyan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, maksud, tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi mengenai gambaran pelayanan perangkat daerah, yang memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran layanan, serta permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN CIMENYAN

Bab III ini memuat tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan Renstra Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi mengenai rencana program, kegiatan dan subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif mulai tahun 2025 hingga tahun 2029.

`

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

`

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN CIMENYAN

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Cimenyan

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Cimenyan

Kedudukan kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Cimenyan mempunyai fungsi sebagai Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya.

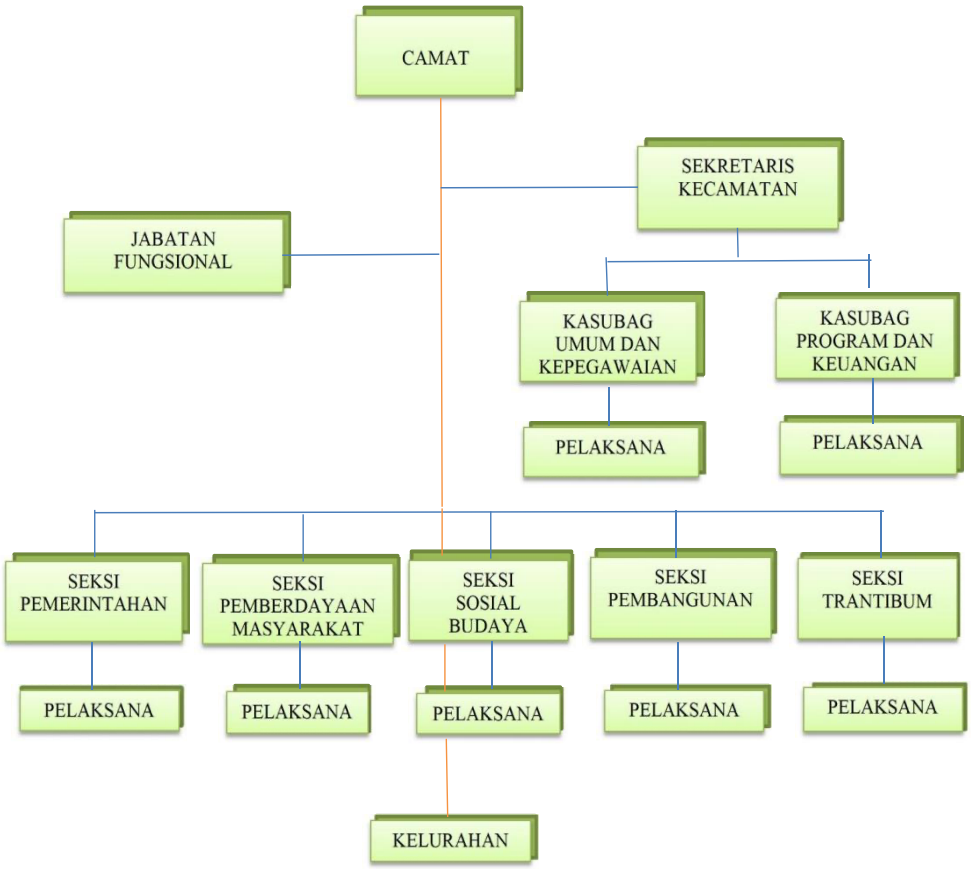
Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, susunan Organisasi Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung terdiri atas:

a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
f. Seksi Sosial Budaya;
g. Seksi Pembangunan;
h. Subbagian Program dan Keuangan;
i. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
j. Kelurahan;

k.Jabatan Fungsional.

Gambaran organisasi tersebut dapat diperjelas melalui struktur organisasi Kecamatan Cimenyan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan



Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Cimenyan, 2025

Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan. Camat membawahkan:

a. Sekretariat Kecamatan;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta, evaluasi dan pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
e. penyelenggaraan dan pengkoordinasian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
f. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
g. penyelenggaraan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya membawahkan Subbagian Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana dan program serta pengelolaan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Subbagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  a. Penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Kecamatan dan Daerah;
  b. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk penyusunan dan penetapan rencana kerja Kecamatan;
  c. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk penyusunan tugas dan fungsi Kecamatan;

d. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
f. Pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Kecamatan;
g. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan; dan
h. Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan sutay menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
b. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk penyusunan dan penetapan tugas dan fungsi Kecamatan;
c. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang

milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;

d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Pemerintahan;

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan.

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Pemberdayaan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas

pokoknya Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

d. Seksi Pembangunan;

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Pembangunan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembangunan;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pembangunan.

e. Seksi Sosial Budaya;

Seksi Sosial Budaya dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sosial Budaya. Dalam

melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial Budaya;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sosial Budaya;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sosial Budaya.

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

g. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan Sebagian kegiatan kecamatan secara

professional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Cimenyan

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung memiliki pegawai PNS sebanyak 38 orang, dengan rincian seperti tabel berikut dibawah ini;

Tabel 2.1 Pegawai Kecamatan Cimenyan berdasarkan Jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	PNS	CPNS	PPPK	Non PNS	Jumlah
1	Laki – laki	20	1	2	6	29
2	Perempuan	3	-	-	3	6
3	Jumlah	23	1	2	9	35

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Cimenyan, 2025

Tabel 2.2 Pegawai Kecamatan Cimenyan berdasarkan Golongan

No	Golongan	Status Kepegawaian						Jumlah
		PNS		CPNS		PPPK		
		L	P	L	P	L	P	
1	Gol. I	-	-	-	-	-	-	0
2	Gol .II	2	-	-	-	-	-	2
3	Gol. III	16	3	1	-	-	-	20
4	Gol. IV	2	-	-	-	-	-	2
5	Gol. V		-	-	-	1	-	1
6	Gol.VII		-	-	-	1	-	1
	Jumlah	20	3	1	-	2		26

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Cimenyan, 2025

`

Tabel 2.3 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No.	Uraian	Eselon I		Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Kecamatan Cimenyan						2	5	2	6	1	16
2	Kelurahan Cibeunying							5				5
3	Kelurahan Padasuka							4		1		5
4	Jumlah						2	14	2	7	1	26

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Cimenyan, 2025

Tabel 2.4 Pegawai Kecamatan Berdasarkan Jabatan dan Golongan Eselon

NO	JABATAN	JUMLAH	PANGKAT / GOL
1	Camat	1 Orang	Pembina Tk.I/IV b
2	Sekretaris Kecamatan	1 Orang	Pembina/IV a
3	Kasi Pemerintahan (Kecamatan)	1 Orang	Penata/III d
4	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Kecamatan)	1 Orang	Penata/III d
5	Kasi Sosbud (Kecamatan)	1 Orang	Penata TK.I/III d

`

NO	JABATAN	JUMLAH	PANGKAT / GOL
6	Kasi Pembangunan (Kecamatan)	1 Orang	Penata Muda TK.I/ III c
7	Kasubag Umum Dan Kepegawaian (Kecamatan)	1 Orang	Penata Muda TK.I/ III b
8	Kasubag Program dan Keuangan (Kecamatan)	1 Orang	Penata / III c
9	Lurah Padasuka	1 Orang	Penata / III c
10	Lurah Cibeunying	1 Orang	Penata Muda TK.I/ III c
11	Seklur Padasuka	1 Orang	Penata/III b
12	Seklur Cibeunying	1 Orang	Penata Muda TK.I/ III b
13	Kasi Pemerintahan (Kelurahan Padasuka)	1 Orang	Penata/III c
14	Kasi Pemerintahan (Kelurahan Cibeunying)	1 Orang	Penata Muda/III b
16	Kasi Pemberdayaan Masyarakat (Kelurahan Padasuka)	1 Orang	Penata TK.I/III d
17	Kasi Trantib (Kel Padasuka)	1 Orang	Penata Muda TK.I/ III c
18	Kasi Trantib (Kel Cibeunying)	1 Orang	Penata Muda TK.I/ III c

`

NO	JABATAN	JUMLAH	PANGKAT / GOL
19	Pelaksana	2 orang	Penata Muda TK.I/ III b
20	Pelaksana	2 orang	Penata Muda/III a
21	Pelaksana	1 orang	Pengatur/II c
22	Pelaksana	1 orang	Pengatur Muda Tk.I / II b
23	Pelaksana (PPPK)	1 Orang	VII
24	Pelaksana (PPPK)	1 Orang	V

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Cimenyan, 2025

Aset Daerah merupakan Kekayaan milik Daerah dan berfungsi pula sebagai penunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Cimenyan. Berikut Aset Daerah yang dikelola oleh Kecamatan Cimenyan:

Tabel 2.5 Hasil Rekonsiliasi Aset Triwulan II Tahun 2025

NO	JENIS ASSET	SALDO AKHIR PER 30 JUNI 2025	AKUMULASI PENYUSUTAN SD 30 JUNI 2025	NILAI BUKU PER 30 JUNI 2025
1	Tanah	498,000,000.00	0.00	498,000,000.00
2	Peralatan Mesin	3,068,071,784.00	2,434,636,304.00	633,435,480.00
3	Gedung Dan Bangunan	7,315,024,857.00	1,774,019,617.00	5,541,005,240.00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	760,661,250.00	601,067,989.00	159,593,261.00
5	Aset Tetap Lainnya	27,030,900.00	0.00	27,030,900.00

`

NO	JENIS ASSET	SALDO AKHIR PER 30 JUNI 2025	AKUMULASI PENYUSUTAN SD 30 JUNI 2025	NILAI BUKU PER 30 JUNI 2025
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ASSET TETAP	11,668,788,791.00	4,809,723,910.00	6,859,064,881.00
7	Aset Tak Berwujud	0.00	0.00	0
8	Aset Lain-Lain/Rusak Berat	430,111,815.00	396,373,815.00	33,738,000.00
9	Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ASSET LAINNYA	430,111,815.00	396,373,815.00	33,738,000.00
	TOTAL ASSET TETAP + TOTAL ASSET LAINNYA	12,098,900,606.00	5,206,097,725.00	6,892,802,881.00

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Cimenyan, 2025

Untuk 5 tahun kedepan dengan rencana strategis yang telah disusun berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang ada pengadaan aset dan pemeliharaan diarahkan pada modernisasi alat kerja/penunjang Kerja (*Hardware*, *software*) dan Pengadaan/pemeliharaan gedung dengan memperhatikan estetika harus representatif dengan segala penunjang atau pendukungnya sesuai ketentuan pada layanan publik.

Kecamatan Cimenyan memiliki potensi pariwisata alam yang dapat dikembangkan dalam 5 tahun kedepan, dengan daya tarik alam dan budaya yang beragam. Desa Ciburial, misalnya, telah resmi menjadi desa wisata yang memadukan tradisi Sunda dengan keindahan pegunungan, menawarkan pengalaman autentik seperti outbond, camping, dan edukasi ekowisata di Alam Santosa. Ikon lainnya termasuk Tebing Keraton dengan pemandangan hutan lebat dan sunset memukau, Tahura (Taman Hutan Raya) untuk rekreasi alam, serta Bukit Bintang untuk healing di malam hari. Ada sekitar 12 tempat rekreasi, 5 hutan lindung dan goa, serta 2 pemandian alami yang tersebar di berbagai desa, yang bisa dikembangkan menjadi paket wisata

terintegrasi. Peluang besar ada pada pariwisata berkelanjutan, seperti wisata desa di Kampung Buntis Bongkor, yang mempromosikan kearifan lokal sambil melestarikan lingkungan. Dengan promosi yang lebih agresif melalui media sosial dan kolaborasi dengan agen travel Bandung, sektor ini berpotensi menyumbang hingga 30-40% pendapatan daerah, sekaligus mendistribusikan manfaat secara merata ke masyarakat pedesaan.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Cimenyan

2.1.3.1 Data-Data dan Informasi Terkait Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Cimenyan

Kecamatan Cimenyan, salah satu dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, memiliki pusat pemerintahan di Desa Cimenyan. Secara administratif, kecamatan ini berbatasan dengan Kota Bandung di sebelah utara, Kecamatan Cilengkrang di timur, Kecamatan Bojongsoang di selatan, dan Kecamatan Kota Bandung di barat. Dengan luas wilayah sekitar 46,99 km², Cimenyan terdiri dari 7 desa dan 2 kelurahan, yaitu Mekarmanik, Cimenyan, Mekarsaluyu, Mandalamekar, Sindanglaya, Cikadut, Ciburial, Kelurahan Padasuka, dan Kelurahan Cibeunying. Wilayah ini didominasi oleh dataran tinggi dan perbukitan dengan ketinggian antara 700 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Topografinya yang bergelombang ditopang oleh jenis tanah latosol dengan kemiringan lereng 15–40%, membuat sebagian wilayah rawan longsor, terutama saat musim hujan. Secara geologis, Cimenyan termasuk dalam kawasan patahan Lembang, yang menjadikannya memiliki potensi kerawanan gempa bumi. Penggunaan lahan di Kecamatan Cimenyan cukup beragam. Sekitar 45%

wilayah digunakan untuk pertanian dan perkebunan, mencerminkan karakter agraris kawasan ini. Permukiman penduduk mencakup sekitar 30% lahan, sementara hutan lindung dan konservasi menempati 15%. Sisanya, sekitar 10%, dimanfaatkan untuk fasilitas umum, badan jalan, dan keperluan lainnya. Dengan kondisi geografis dan geologis yang khas, Cimenyan menawarkan potensi sekaligus tantangan dalam pengelolaan wilayahnya.

Berdasarkan data demografi terakhir tahun 2024, jumlah penduduk Kecamatan Cimenyan tercatat sebanyak 113.143 jiwa dengan komposisi umur yang relatif seimbang antara kelompok usia muda, usia produktif, dan lanjut usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.6 Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Jumlah Jiwa
0–4	7.029
5–9	9.142
10–14	9.605
15–19	4.07
20–24	9.806
25–29	8.881
30–34	8.57
35–39	7.731
40–44	9.3
45–49	8.242
50–54	7.038
55–59	6.001
60–64	4.973
65–69	3.616

`

Kelompok Umur	Jumlah Jiwa
70–74	2.418
≥75	2.291
Total	113.143

Sumber: Data Agregat Penduduk Disdukcapil, 2024

Pertumbuhan ini akan membawa perubahan kuantitatif pada setiap kelompok umur. Kelompok usia dini (0–14 tahun) diperkirakan tetap berkisar pada 23% dari total penduduk, dengan jumlah mencapai lebih dari 29 ribu jiwa pada tahun 2029. Hal ini menandakan kebutuhan pelayanan pendidikan dasar dan fasilitas kesehatan anak akan semakin meningkat.

Kelompok usia produktif (15–64 tahun) masih menjadi dominan dengan porsi sekitar 67–68% dari total penduduk. Pada tahun 2029, jumlah usia produktif diperkirakan menembus angka 83 ribu jiwa. Kondisi ini mencerminkan potensi bonus demografi yang dapat dioptimalkan melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan keterampilan, serta penguatan sektor ekonomi kreatif dan UMKM.

Sementara itu, kelompok lanjut usia (≥65 tahun) menunjukkan kecenderungan peningkatan secara gradual hingga mencapai lebih dari 9 ribu jiwa pada tahun 2029, atau sekitar 7% dari total penduduk. Hal ini mengindikasikan perlunya perhatian lebih pada layanan sosial, kesehatan lansia, dan program kesejahteraan berbasis komunitas.

Secara umum, proyeksi demografi Kecamatan Cimenyan lima tahun ke depan menggambarkan tren pertumbuhan yang konsisten dengan struktur penduduk yang didominasi usia produktif. Tantangan

utama yang muncul adalah penyediaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan yang memadai, serta kesiapan menghadapi peningkatan jumlah penduduk lanjut usia. Dengan perencanaan pembangunan yang tepat, Kecamatan Cimenyan berpeluang besar memanfaatkan momentum bonus demografi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2021-2024

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Cimenyan dilaksanakan dengan mengacu pada indikator kinerja yang relevan dengan tugas serta fungsi Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung sebagaimana tertuang dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021–2026 serta Perubahan Renstra Kecamatan Cimenyan Tahun 2021–2026. Dalam periode perencanaan tersebut, Kecamatan Cimenyan menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), serta merumuskan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator sasaran strategis. Rincian target, realisasi, serta capaian tujuan dan sasaran Kecamatan Cimenyan selama tahun 2021–2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7 Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cimenyan Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai AKIP	-	-	-	70	72	72	73	74	70.06	72.75	76.5	N/A	N/A	100.09	101.04	106.25	N/A	N/A
2	Persentase BMD/Asset Dalam Kondisi Baik	-	-	-	90	90	90	90	90	90	90	90	N/A	N/A	100.00	100.00	100.00	N/A	N/A

`

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
3	IKM	-	-	-	82,00	83,00	84,00	89,59	90,00	87,55	89,14	90,04	N/A	N/A	106.77	107.40	107.19	N/A	N/A
4	Persentase Desa yang Beradministrasi Baik	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	77.71	N/A	N/A	100.00	100.00	77.71	N/A	N/A

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Cimenyan, 2025

2.1.3.3 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian dan Kinerja Yang Menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Cimenyan Pada Renstra Tahun 2021-2026 Mencakup Program, Kegiatan, Dan SubKegiatan

Dalam rangka menjamin keterpaduan antara program, kegiatan, dan subkegiatan dengan tujuan serta sasaran pembangunan daerah, Kecamatan Cimenyan melaksanakan evaluasi atas capaian kinerja Renstra Tahun 2021–2026. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan yang dijalankan telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), serta hasil (output dan outcome) pembangunan yang menjadi tanggung jawab kecamatan.

Penyusunan hasil evaluasi secara sistematis diharapkan mampu menghadirkan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Cimenyan Tahun 2021–2026. Selain menjadi instrumen pertanggungjawaban kinerja, evaluasi ini juga menjadi pijakan strategis bagi penyusunan Renstra Kecamatan Cimenyan Tahun 2025–2029 agar lebih responsif terhadap dinamika, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung.

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung

No	Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-				-		
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.00 Poin	72.00 Poin	72.00 Poin	73.00 Poin	74 Poin	70.06 Poin	72.75 Poin	76.5 Poin	80.68 Poin	-	72,2 Poin	74,975 Poin
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	-	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	-	2 Dokumen	1,5 Dokumen
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	-	1,6 Dokumen	1,5 Dokumen
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	-	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	-	-	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen
6	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	-	1.00 Dokumen	1,25 Dokumen
7	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	-	2,8 Dokumen	1.00 Dokumen
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Dokumen	-	1.00 Laporan	1.00 Laporan	-	1.00 Laporan	1.00 Laporan
9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00 %	100.00 %	100%	100%	100%	30%	25%	98,33%		-	100%	51,11%
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.00 Bulan	30.00 Orang/Bulan	30.00 Orang/Bulan	30.00 Orang/Bulan	30.00 Orang/Bulan	12.00 Bulan	30.00 Orang/Bulan	28.00 Orang/bulan	15.00 Orang/bulan	-	26.40 Orang/Bulan	21,25 Orang/Bulan
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Dokumen	-	1.00 Laporan		-	1.00 Laporan	0,66 Laporan
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Dokumen	-	1.00 Laporan	-	-	1.00 Laporan	1.00 Laporan
13	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	-	1.00 Dokumen	-	-	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen

No	Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Target	Realisasi
14	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	90.00%	100%	90.00 %	100.00 %	100.00 %	270%	100%	150%	-	-	96%	173%
15	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Laporan	1.00 Dokumen	4.00 Laporan	4.00 Laporan	3.00 Dokumen	1.00 Laporan	3.00 Dokumen	-		2.00 Laporan	2,33 Laporan
16	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100%	100%	100.00 %	-	-	100%	100%
17	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	-	-	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen
18	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	105%	100%	105%	-	-	100.00 %	103%
19	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	30.00 Paket	30.00 Paket	-	-	-	-	-	30 Paket	-
20	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.00 Dokumen	30.00 Dokumen	30.00 Dokumen	30.00 Dokumen	30.00 Dokumen	30.00 Dokumen	30.00 Dokumen	30.00 Dokumen	-	-	30.00 Dokumen	30.00 Dokumen
21	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
22	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.00 Orang	30.00 Orang	30.00 Orang	30.00 Orang	30.00 Orang	96.00 Orang	-	28.00 Orang	-	-	30.00 Orang	41.00 Orang
23	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %		40,22%	60,83%	27,78%	-	100.00 %	86,3%
24	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.00 Jenis	12.00 Paket	12.00 Paket	12.00 Paket	12.00 Paket	7.99 Jenis	8 Paket	4.00 Paket	-	-	12.00 Paket	6,6 Paket
25	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.00 Paket	3.00 Paket	12.00 Paket	3.00 Paket	3.00 Paket	4.00 Paket	2.05 Paket	12.00 Paket	2.00 Paket	-	4,8 Paket	5 Paket
26	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.00 Jenis	12.00 Paket	12.00 Paket	12.00 Paket	12.00 Paket	7.00 Jenis	5 Paket	12.00 Paket	6.00 Paket	-	12.00 Paket	6 Paket
27	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.00 Paket	12.00 Paket	12.00 Paket	12.00 Paket	12.00 Paket	3.90 Paket	6.00 Paket	10.00 Paket	6.00 Paket	-	12.00 Paket	5 Paket
28	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	Fasilitasi Kunjungan Tamu	138.00 Box	138.00 Laporan	138.00 Laporan	138.00 Laporan	138.00 Laporan	193.00 Box	11.00 Laporan	0	-	-	138.00 Laporan	102.00 Laporan

`

No	Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Target	Realisasi
30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00 Laporan	15.00 Laporan	15.00 Laporan	15.00 Laporan	15.00 Laporan	300.00 Laporan	1.00 Laporan	4.00 Laporan	-	-	14,4 Laporan	101,6 Laporan
31	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	43.75%	12.50%	90.00 %	-	-	98%	48,75%
32	Pengadaan Mebel	3.00 Unit	3.00 Unit	3.00 Unit	3.00 Unit	3.00 Unit	3.00 Unit	-	3.00 Unit	-	-	3.00 Unit	3.00 Unit
33	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.00 Unit	4.00 Unit	4.00 Unit	4.00 Unit	4.00 Unit	3.00 Unit	1.00 Unit	4.00 Unit	-	-	4.00 Unit	2 Unit
34	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	95.53%	38,89%	100.00 %		-	100.00 %	78%
35	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.00 Laporan	1,000.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	2,250.00 Laporan	0	1.00 Laporan	-	-	1,6 Laporan	1 Laporan
36	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	9.00 Laporan	5.00 Laporan	12.00 Laporan	6.00 Laporan	-	12.00 Laporan	6,4 Laporan
37	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.00 Paket	3.00 Paket	12.00 Paket	3.00 Paket	3.00 Paket	4.00 Paket	2.05 Paket	12.00 Paket	3.00 Paket	-	4,8 Paket	5,25 Paket
38	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	9.00 Laporan	12.00 Laporan	8.00 Laporan	-	12.00 Laporan	10,25 Laporan
39	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	90.00 %	90.00 %	100.00 %	100.00 %	66,67%	58,33%	90.00 %	11,11%	-	96%	56,5%
40	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.00 Unit	6.00 Unit	6.00 Unit	6.00 Unit	6.00 Unit	9.00 Unit	2.00 Unit	6.00 Unit	2.00 Unit	-	6.00 Unit	4,75 Unit
41	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.00 Unit	4.00 Unit	4.00 Unit	4.00 Unit	4.00 Unit	6.00 Unit	3.00 Unit	4.00 Unit	-	-	4.00 Unit	4,3 Unit
42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.00 Unit	3.00 Unit	3.00 Unit	3.00 Unit	3.00 Unit	3.00 Unit	2.00 Unit	3.00 Unit	-	-	3.00 Unit	2,66 Unit
43	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	82.00 Poin	82.00 Poin	80.00 POINT	90.00 Poin	90.00 Poin	87,55	89,14	90,04	90,2	-	84,4 Poin	89,25 Poin
44	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100%	0	70%	-		100.00 %	56,5%
45	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	500.00 OK	500.00 OK	1.00 Laporan	500.00 Laporan	500.00 Laporan	2,000.00 OK	-	1.00 Laporan	-	-	-	-
46	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	90.00 %	90.00 %	100.00 %	100.00 %	-	90.00 %	90.00 %	16,67%	-	95%	65,5%

`

No	Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Target	Realisasi
47	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	-	-	1.00 Dokumen	-	-	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen
48	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	687.50%	37,50%	100.00 %		-	100.00 %	275%
49	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4.00 Kegiatan	4.00 Kegiatan	4.00 Kegiatan	4.00 Laporan	4.00 Laporan	275.00 Kegiatan	1.50 Kegiatan	4.00 Kegiatan	2.00 Laporan	-	4.00 Kegiatan	2.5 Kegiatan
50	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-	-	**50%**	500%	100.00 %	-	-	100.00 %	216%
51	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	100.00 %	100.00 %	-	-	-	-	100.00 %		-	100.00 %	100.00 %
52	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen			1.00 Dokumen	5.00 Dokumen	-	-	-	1.00 Dokumen	2 Dokumen
53	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	1.00 Laporan	-	-	-	-	1.00 Laporan		-	1.00 Laporan	1.00 Laporan
54	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	25%	50%	100.00 %		-	100.00 %	58,33%
55	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.00 Dokumen	2	2	2	2	0	0	2		-	1,8	1
56	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.00 Kegiatan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Kegiatan	1.00 Laporan	1.00 Laporan		-	1.00 Laporan	1.00 Laporan
57	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	-	-	1.00 Laporan	1.00 Laporan	-	-	-		-	1.00 Laporan	-
58	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.00 %	100.00 %	-	-	-	59.83%	202,92%	-		-	100.00 %	131,75%
59	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	300.00 HOK	300.00 HOK	1			296.00 HOK	5.00 HOK	-		-	300.00 HOK	150.00 HOK
60	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4.00 Unit	4.00 Unit	-	-	-	4.00 Unit	0	-		-	4.00 Unit	2.00 Unit
61	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	-	-	-	9.00 Kegiatan	38.00 Kegiatan	-		-	5.00 Kegiatan	22,5 Kegiatan
62	Evaluasi Kelurahan	2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	-	-	-	2.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	-		-	2.00 Kegiatan	1,5 Kegiatan
63	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	25%	50%	100.00 %		-	100.00 %	58,33%

`

No	Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Target	Realisasi
64	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.00 Dokumen	2	2	2	2	0	0	2		-	1.00 Dokumen	0,66
65	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.00 Kegiatan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Kegiatan	1.00 Laporan	1.00 Laporan		-	1.00 Laporan	1.00 Laporan
66	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	100.00 %	100.00 %	-	-	-		-	100.00 %	-
67	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	-	-	120.00 Keluarga	120.00 Keluarga	-	-	-		-	120.00 Keluarga	
68	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	120.00 Keluarga	120.00 Keluarga	-	-	-		-	120.00 Keluarga	
69	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	-	-	-	120.00 Keluarga	120.00 Keluarga	-	-	-		-	120.00 Keluarga	
70	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	-	-	-	120.00 Keluarga	120.00 Keluarga	-	-	-		-	120.00 Keluarga	
71	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	82.00 Poin	82.00 Poin	84,00 Poin	90.00 Poin	90.00 Poin	87,55 Poin	89,14	90,04	90,2	-	84,4 Poin	89,25 Poin
72	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100.00 %	90.00 %	90.00 %	100.00 %	100.00 %	5%	50%	90.00 %		-	96%	48,33%
73	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100.00 Orang	2.00 Dokumen	2.00 Laporan	2.00 Laporan	2.00 Laporan	10.00 Orang	1.00 Dokumen	2.00 Laporan		-	2.00 Laporan	1,5 Laporan
74	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	82.00 Poin	82.00 Poin	84,00 Poin	90.00 Poin	90.00 Poin	87,55 Poin	89,14	90,04	90,2	-	84,4 Poin	89,25 Poin
75	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50%	825%	95.00 %		-	100.00 %	323,33%
76	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	-	-	-	2.00 Dokumen	23.00 Dokumen	-		-	2.00 Dokumen	12,5 Dokumen

`

No	Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Target	Realisasi
77	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	-	45.00 Orang	40.00 Orang	40.00 Orang	-	-	45.00 Orang		-	41.00 Orang	15 Orang
78	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	-				-	-			-		
79	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	45.00 Orang	45.00 Orang	45.00 Orang	1.00 Dokumen	5.00 Dokumen	45.00 Orang		-	45.00 Orang	45.00 Orang
80	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	1.00 Dokumen	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	-	-	1.00 Dokumen		-	8 Dokumen	1 Dokumen
81	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100.00 %	100.00 %	-	-	18.75%	12,50%	78.00 %		-	100.00 %	36,4%
82	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-	-	0	0	78.00 %		-	100.00 %	26%
83	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0	0	1.00 Dokumen		-	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen
84	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	-	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	-	-	1.00 Dokumen		-	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen
85	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0	1.00 Dokumen		-	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen
86	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5.00 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-		-		
87	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	1.00 Dokumen	-	1.00 Dokumen		-	2.00 Dokumen	1.00 Dokumen
88	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	0	0.50 Dokumen	1.00 Laporan		-	1.00 Dokumen	0.75 Dokumen

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Cimenyan, 2025

Tabel 2.9 Realisasi Program dan Kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja Tahun 2021-2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
											Anggaran	Realisasi
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(6)	(12)	(13)		(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,906,036,000.00	7,883,837,000.00	7,883,837,000.00	7,898,837,000.00	7,898,837,000.00	86.81%	47.20%	98%	22.39%	0	324.9%	284.74%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19,500,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00	96.48%	114.11%	51%	0.00%	0	325.0%	163.34%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	48.30%	51.70%	83%	0.00%	0	325.0%	267.97%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	357.88%	440.68%	20%	0.00%	0	325.0%	127.65%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0%	0.00%	0	0.0%	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	14.93%	21.25%	60%	0.00%	0	325.0%	426.61%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	59.50%	47.60%	0%	0.00%	0	325.0%	80.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00			66%	0.00%	0	325.0%	#DIV/0!
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,288,737,000.00	7,288,737,000.00	7,288,737,000.00	7,288,737,000.00	7,288,737,000.00	86.71%	46.83%	89%	22.96%	0	325.0%	269.70%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,279,737,000.00	7,279,737,000.00	7,279,737,000.00	7,279,737,000.00	7,279,737,000.00	86.82%	46.89%	89%	22.99%	0	325.0%	269.62%

`

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
											Anggaran	Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00%	0.00%	0%	0.00%	0	325.0%	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00%	0.00%	60%	0.00%	0	325.0%	0.00%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00%	0.00%	40%	0.00%	0	325.0%	0
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	62.66%	0.00%	79%	0.00%	0	325.0%	0.00%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	62.66%	0.00%	79%	0.00%	0	325.0%	0.00%
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%	0.00%	0%	0.00%	0	325.0%	0.00%
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%	0.00%	0%	0.00%	0	325.0%	0.00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	47.05%	0.00%	22%	0.00%	0	375.0%	0.00%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00			0%	0.00%	0	#DIV/0!	0.00%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	20.40%	0.00%	0%	0.00%	0	325.0%	0.00%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0.00%	0	#DIV/0!	0.00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	52.38%	0.00%	26%	0.00%	0	325.0%	0.00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	82,500,000.00	82,500,000.00	82,500,000.00	82,500,000.00	82,500,000.00	47.26%	33.17%	62%	6.06%	0	325.0%	267.84%

`

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
											Anggaran	Realisasi
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	76.16%	26.14%	65%	0.00%	0	325.0%	281.70%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	68.86%	46.38%	149%	0.00%	0	325.0%	389.23%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	33.09%	0.00%	0%	55.56%	0	325.0%	0.00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	17.29%	65.81%	8%	0.00%	0	325.0%	392.74%
Penyediaan Bahan/Material	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0.00%	0	#DIV/0!	0.00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	71.50%	25.28%	0%	0.00%	0	325.0%	0%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	6.06%	0.00%	5%	0.00%	0	325.0%	0.00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	68.64%	0.00%	16%	0.00%	0	325.0%	0.00%
Pengadaan Mebel	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	52.00%	0.00%	99%	0.00%	0	325.0%	0.00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	83.32%	0.00%	30%	0.00%	0	325.0%	0.00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410,799,000.00	388,600,000.00	388,600,000.00	388,600,000.00	388,600,000.00	101.62%	61.42%	113%	23.09%	0	319.6%	264.33%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%	0.00%	49%	0.00%	0	325.0%	0.00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	58.52%	69.80%	11%	10.85%	0	325.0%	235.65%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!	0.00%	0	0.0%	0.00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	370,799,000.00	348,600,000.00	348,600,000.00	348,600,000.00	348,600,000.00	107.06%	61.46%	11%	0.00%	0	319.0%	75.97%

`

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
											Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34,500,000.00	34,500,000.00	34,500,000.00	34,500,000.00	34,500,000.00	85.99%	57.41%	63%	0.00%	0	325.0%	176.12%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	78.67%	20.83%	5%	0.00%	0	325.0%	50.77%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	53.60%	9%	0.00%	0	325.0%	69.79%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14,500,000.00	14,500,000.00	14,500,000.00	14,500,000.00	14,500,000.00	88.74%	96.55%	14%	0.00%	0	325.0%	123.42%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	66,977,000.00	76,977,000.00	76,977,000.00	76,977,000.00	76,977,000.00	202.27%	8.44%	42%	16.89%	0	339.9%	537.90%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	100.00%	0.00%	0%	0.00%	0	325.0%	0.00%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	100.00%	0.00%	0%	0.00%	0	325.0%	0.00%
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%	0.00%	36%	0.00%	0	0.0%	0.00%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%	0.00%	36%	0.00%	0	0.0%	0.00%

`

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
											Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60,477,000.00	60,477,000.00	60,477,000.00	60,477,000.00	60,477,000.00	213.26%	10.75%	52%	21.50%	0	325.0%	533.72%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60,477,000.00	60,477,000.00	60,477,000.00	60,477,000.00	60,477,000.00	213.26%	10.75%	52%	21.50%	0	325.0%	533.72%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,455,600,000.00	2,485,600,000.00	2,490,600,000.00	2,485,600,000.00	2,485,600,000.00	100.27%	37.64%	23%	6.21%	0	326.2%	124.91%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	45,000,000.00	45,000,000.00	50,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	61.62%	62.00%	86%	0.00%	0	326.1%	238.54%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	61.62%	62.00%	0%	0.00%	0	0.0%	0.00%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00			86%	0.00%	0	0.0%	0.00%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0.00	35,000,000.00	82,000,000.00	35,248,000.00	35,248,000.00			58%	0.00%	0	0.0%	0.00%
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	0.00	25,000,000.00	72,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00			52%	0.00%	0	0.0%	0.00%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00			100%	0.00%	0	0.0%	0.00%
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	0.00	0.00	0.00	5,248,000.00	5,248,000.00			0%	0.00%	0	0.0%	0.00%

`

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
											Anggaran	Realisasi
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2,410,600,000.00	2,410,600,000.00	2,410,600,000.00	2,410,600,000.00	2,410,600,000.00	100.99%	37.49%	23%	6.40%	0	325.0%	126.13%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	98.80%	85.41%	71%	134.25%	0	325.0%	358.07%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	750,000,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00	110.83%	0.00%	38%	0.00%	0	325.0%	0.00%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,540,600,000.00	1,540,600,000.00	1,540,600,000.00	1,540,600,000.00	1,540,600,000.00	96.32%	55.16%	17%	4.79%	0	325.0%	116.21%
Evaluasi Kelurahan	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00%	4.33%	0%	0.00%	0	325.0%	0.00%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00		13.65%	16%	0.00%	0	0.0%	0.00%
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		0.00%	19%	0.00%	0	0.0%	0.00%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		40.95%	100%	0.00%	0	0.0%	0.00%
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0.00%	0	0.0%	0.00%
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00			0%	0.00%	0	0.0%	0.00%
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00			0%	0.00%	0	0.0%	0.00%
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00			0%	0.00%	0	0.0%	0.00%

`

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
											Anggaran	Realisasi
Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya												
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00			0%	0.00%	0	0.0%	0.00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00%	46.48%	14%	0.00%	0	325.0%	0.00%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00%	46.48%	14%	0.00%	0	325.0%	0.00%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00%	46.48%	14%	0.00%	0	325.0%	0.00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32,522,000.00	70,522,000.00	103,044,000.00	67,522,000.00	67,522,000.00	121.16%	25.55%	4%	0.00%	0	453.5%	36.13%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	32,522,000.00	70,522,000.00	103,044,000.00	67,522,000.00	67,522,000.00	121.16%	25.55%	4%	0.00%	0	453.5%	36.13%
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	15,522,000.00	15,522,000.00	15,522,000.00	15,522,000.00	15,522,000.00	66.68%	28.44%	0%	0.00%	0	325.0%	#DIV/0!

`

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
											Anggaran	Realisasi
Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia												
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			15,522,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00			10%	0.00%	0	0.0%	#DIV/0!
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0.00%	0	0.0%	#DIV/0!
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	170.91%	53.53%	4%	0.00%	0	325.0%	38.58%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0.00	38,000,000.00	55,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00			3%	0.00%	0	0.0%	0.00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	70,000,000.00	30,000,000.00	85,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00%	8.67%	6%	122.13%	0	404.1%	87.61%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	70,000,000.00	30,000,000.00	85,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00%	8.67%	6%	122.13%	0	404.1%	87.61%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%	0.00%	0%	0.00%	0	275.0%	0
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0.00	0.00	55,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00			8%	366.38%	0	0.0%	0.00%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%	0.00%	13%	0.00%	0	258.3%	0.00%

`

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
											Anggaran	Realisasi
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0.00%	0	0.0%	0.00%
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	30,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%	0.00%	0%	0.00%	0	258.3%	0.00%
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	15,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%	26.00%	0%	0.00%	0	291.7%	0.00%
TOTAL	10,561,135,000.00	10,576,936,000.00	10,669,458,000.00	10,603,936,000.00	10,603,936,000.00	89.95%	44.42%	129%	18.77%	0	325.4%	354.66%

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Cimenyan, 2025

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Cimenyan

Dalam penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Cimenyan, identifikasi kelompok sasaran layanan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Sebagai wilayah penyangga Kota Bandung yang memiliki karakteristik semi-perkotaan dan pedesaan, Kecamatan Cimenyan menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks, mencakup aspek sosial, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan hidup. Berikut adalah kelompok sasaran layanan yang menjadi fokus utama Kecamatan Cimenyan berdasarkan sektor-sektor strategis:

a. Sektor Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan

Sasaran layanan mencakup seluruh warga masyarakat yang memerlukan layanan administrasi seperti surat pengantar, keterangan domisili, kependudukan, dan perizinan usaha kecil. Banyaknya permukiman baru dan mobilitas penduduk yang tinggi di kawasan perbatasan Kota Bandung menjadikan layanan administrasi sebagai kebutuhan yang harus dilayani secara cepat dan tepat.

b. Sektor Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

Kelompok masyarakat miskin, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta korban bencana seperti longsor dan banjir di wilayah rawan seperti Desa Ciburial dan Mekarmanik menjadi prioritas sasaran. Program bantuan sosial dan peningkatan ketangguhan masyarakat terhadap bencana sangat dibutuhkan, mengingat kondisi geografis Cimenyan yang rawan bencana alam.

c. Sektor Ekonomi, Pertanian dan UMKM

Sasaran mencakup petani sayuran, peternak, pelaku usaha rumah tangga, dan pelaku wisata alam. Kecamatan Cimenyan memiliki potensi ekonomi berbasis pertanian dan

pariwisata, terutama di wilayah Desa Cimenyan dan Desa Mandalamekar. Pemberdayaan UMKM lokal dan pengembangan desa wisata menjadi fokus layanan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

d. Sektor Infrastruktur dan Penataan Lingkungan

Kelompok sasaran meliputi warga yang bermukim di wilayah dengan akses jalan terbatas, masyarakat yang membutuhkan fasilitas sanitasi dasar, serta komunitas peduli lingkungan. Permasalahan jalan rusak, akses air bersih, dan penataan kawasan padat di lereng bukit menjadi isu yang perlu ditangani secara berkesinambungan.

e. Sektor Pendidikan, Pemuda dan Kepemudaan

Pelajar, anak usia sekolah, dan organisasi kepemudaan (Karang Taruna, Pramuka) menjadi kelompok sasaran dari program pemberdayaan generasi muda. Kegiatan difokuskan pada pembinaan karakter, pelatihan keterampilan, serta penguatan peran pemuda dalam pembangunan desa.

f. Sektor Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Sasaran layanan adalah masyarakat dan lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, dan Linmas. Kecamatan Cimenyan berperan dalam koordinasi dengan aparat kewilayahan dan TNI/Polri dalam menjaga stabilitas wilayah, terutama pada masa pemilu, kegiatan keagamaan besar, dan penataan kawasan wisata.

Dengan mengidentifikasi kelompok sasaran layanan berdasarkan kondisi sosial dan geografis Kecamatan Cimenyan, maka arah kebijakan dan program dalam Renstra dapat disusun secara lebih tajam, relevan, dan berdaya guna. Pendekatan ini memperkuat peran Kecamatan sebagai simpul pelayanan publik yang hadir langsung menjawab kebutuhan warga.

2.1.5 Mitra Kecamatan Cimenyan dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kecamatan Cimenyan telah mengembangkan berbagai kolaborasi lintas sektor yang melibatkan dunia usaha, NGO, serta antar-desa dan antarwilayah.

1. Kolaborasi dengan Dunia Usaha melalui CSR
   - Beberapa perusahaan yang memiliki program tanggung jawab sosial di wilayah Kabupaten Bandung berkontribusi dalam mendukung pembangunan di Kecamatan Cimenyan.
   - Contoh nyata: CSR dari perusahaan perbankan membantu pembangunan sarana air bersih di Desa Mekarsaluyu dan penyediaan beasiswa pendidikan untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.
   - CSR dari perusahaan telekomunikasi mendukung pelatihan literasi digital dan penyediaan perangkat Wi-Fi gratis di area pelayanan publik kecamatan.
2. Kerja Sama dengan NGO dan Organisasi Masyarakat Sipil
   - NGO yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat menjalin kemitraan dengan Puskesmas Cibeunying dan Puskesmas Padasuka untuk program posyandu remaja, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, serta kampanye gizi seimbang.
   - LSM lingkungan hidup mendukung kegiatan bank sampah dan penanaman pohon di kawasan perbukitan Cimenyan untuk menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah longsor.
   - Lembaga nirlaba pendidikan memberikan pelatihan keterampilan wirausaha dan kerajinan tangan bagi kelompok perempuan di Desa Cimenyan.
3. Kerja Sama Antar-Desa dan Antar-Wilayah
   - Desa-desa di Kecamatan Cimenyan berkolaborasi dalam pengelolaan potensi wisata alam seperti Tebing Keraton, Bukit Moko, dan Puncak Bintang melalui forum desa wisata terpadu. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan promosi pariwisata sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

`

- Kerja sama lintas kabupaten/kota terjalin dengan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat dalam pengembangan aksesibilitas wisata, pengendalian alih fungsi lahan, serta penanganan banjir dan sampah yang bersifat lintas batas administrasi.
- Forum musyawarah antar-desa (MAD) digunakan sebagai wadah untuk menyelaraskan program pembangunan, termasuk pengelolaan pasar desa dan pengembangan UMKM yang saling terhubung.

Dengan adanya pola kolaborasi tersebut, Kecamatan Cimenyan tidak hanya berperan sebagai penyelenggara pelayanan dasar, tetapi juga sebagai penghubung antara berbagai aktor pembangunan. Kolaborasi lintas sektor ini memperkuat kapasitas kecamatan dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Cimenyan

2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

RPJMN 2025-2029 menjadi dasar hukum untuk penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan RPJMD. Dokumen ini juga mengarahkan partisipasi BUMN, swasta, dan aktor non-negara dalam pembangunan nasional. Setiap prioritas nasional diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, dan proyek prioritas dengan indikator terukur untuk memastikan pelaksanaan yang terarah dan terukur.

Bagi Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang memiliki karakteristik wilayah dataran tinggi, pertanian, dan risiko geologis seperti patahan Lembang, RPJMN 2025-2029 relevan melalui prioritas pembangunan berbasis wilayah. Fokus pada swasembada pangan dan pengembangan agromaritim

dapat mendukung optimalisasi lahan pertanian dan perkebunan yang mencakup 45% wilayah Cimenyan. Program pengentasan kemiskinan dan pembangunan dari desa dapat memperkuat ekonomi lokal di 7 desa, seperti Mekarmanik dan Cikadut. Selain itu, kebijakan ketahanan bencana sejalan dengan kebutuhan mitigasi risiko longsor dan gempa bumi di wilayah ini. Penguatan infrastruktur juga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan yang berbatasan dengan Kota Bandung.

RPJMN 2025-2029 menjadi fondasi kokoh untuk mewujudkan Indonesia yang maju, inklusif, dan berkelanjutan, dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sebagai kunci keberhasilan.

2.2.2 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

Kecamatan Cimenyan, sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung, memiliki karakteristik geografis dan sosial yang unik, dengan wilayah dataran tinggi, dominasi lahan pertanian dan perkebunan (45%), serta potensi risiko geologis akibat patahan Lembang. Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang menargetkan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 melalui visi “Bersama Indonesia Maju”, Kecamatan Cimenyan dapat mengintegrasikan program prioritas dan pendukung nasional untuk mendukung pembangunan lokal yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis potensi wilayah.

Kecamatan Cimenyan, sebagai pusat pemerintahan yang melayani 7 desa seperti Cimenyan, Mekarmanik, dan Cikadut, dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan sesuai dengan misi RPJMD untuk reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Program ini mendukung peningkatan pelayanan publik, seperti penyediaan akses administrasi kependudukan, perizinan, dan layanan kesehatan di wilayah yang memiliki ketinggian 700–1.200 mdpl. Dengan

memanfaatkan transformasi digital yang ditekankan dalam RPJMN, pelayanan publik di Cimenyan dapat dioptimalkan melalui sistem berbasis teknologi, seperti aplikasi layanan desa daring, untuk mempermudah akses masyarakat di wilayah perbukitan yang sulit dijangkau.

Dengan 45% lahan digunakan untuk pertanian dan perkebunan, pemberdayaan masyarakat desa di Cimenyan selaras dengan misi RPJMD Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan. Program ini dapat diwujudkan melalui pelatihan petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian, pengembangan agribisnis berbasis komoditas lokal, dan penguatan koperasi desa. Desa-desa seperti Sindanglaya dapat menjadi fokus pengembangan ekonomi berbasis UMKM dan kewirausahaan, sejalan dengan prioritas nasional untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga dapat mencakup edukasi mitigasi bencana, mengingat wilayah ini rawan longsor dan gempa bumi.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum mendukung koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kecamatan, kabupaten, dan provinsi, sesuai dengan visi RPJMD Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel. Di Cimenyan, program ini relevan untuk memastikan keselarasan pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas umum (10% lahan), dengan rencana nasional. Hal ini juga mencakup pengelolaan hutan lindung (15% lahan) agar sejalan dengan kebijakan ekonomi hijau dan konservasi lingkungan, sehingga mendukung ketahanan ekologi di kawasan rawan bencana

`

2.2.3 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036, yang tetap menjadi acuan hingga periode 2025-2030, penataan ruang di Kabupaten Bandung merupakan proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Tujuannya adalah mengoptimalkan dan mensinergikan sumber daya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kecamatan Cimenyan, sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Bandung, memainkan peran strategis dalam rencana ini, dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan lingkungan yang khas, seperti topografi perbukitan, tanah latosol, dan risiko geologis akibat patahan Lembang.Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan CimenyanBerdasarkan RTRW Kabupaten Bandung 2016-2036 dan pembaruan kebijakan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 2025-2045, Kecamatan Cimenyan memiliki karakteristik dan arahan pengembangan sebagai berikut:

1. Kecamatan Cimenyan termasuk dalam Kawasan Bandung Utara, yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi karena peran pentingnya sebagai daerah resapan air dan penyangga ekologi Cekungan Bandung. Wilayah ini memiliki fungsi konservasi lingkungan yang krusial, sejalan dengan kebijakan ekonomi hijau dan biru dalam RPJMN 2025-2029.
2. Cimenyan merupakan kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai pusat permukiman untuk melayani kegiatan antar-desa, seperti di Desa Cimenyan, Mekarmanik, dan Sindanglaya. Pusat pelayanan ini mendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat setempat, dengan fokus pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perdagangan skala lokal.

3. Wilayah Cimenyan memiliki fungsi utama sebagai kawasan permukiman (30%), pertanian dan perkebunan (45%), hutan lindung dan konservasi (15%), serta fasilitas umum seperti jalan dan infrastruktur lainnya (10%). Pengembangan agribisnis, pariwisata berwawasan lingkungan, perdagangan, dan jasa menjadi arahan utama untuk mendukung ekonomi lokal yang tangguh dan berkelanjutan, sesuai dengan RDTR 2025-2045.
4. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik sebagai lokasi proyek nasional seperti jalan tol, Cimenyan memiliki peran strategis karena berbatasan dengan Kota Bandung. Pengembangan infrastruktur jalan dan transportasi di wilayah ini diarahkan untuk meningkatkan konektivitas dengan pusat-pusat perkotaan, mendukung misi RPJMN 2025-2029 untuk pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi.
5. Cimenyan memiliki potensi sebagai kawasan wisata berbasis alam, memanfaatkan keindahan dataran tinggi dan perbukitan pada ketinggian 700–1.200 mdpl. Pengembangan UMKM di sektor agribisnis dan pariwisata, seperti produk olahan pertanian atau wisata agroekologi, menjadi fokus untuk mendukung kewirausahaan dan ekonomi lokal, sejalan dengan prioritas RPJMN untuk ekonomi kreatif.
6. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) mengidentifikasi Cimenyan sebagai kawasan rawan bencana longsor dan gempa bumi, mengingat lokasinya di zona patahan Lembang dan kemiringan lereng 15–40%. Alih fungsi lahan dari hutan atau perkebunan ke permukiman meningkatkan risiko longsor, terutama pada musim hujan, sementara potensi gempa bumi menuntut pembangunan infrastruktur tahan bencana.
7. Sebagai bagian dari Kawasan Bandung Utara, Cimenyan memiliki fungsi sebagai kawasan konservasi geologi dan ekologi, terutama untuk menjaga daerah resapan air dan hutan lindung. Pengelolaan 15% lahan hutan lindung

diarahkan untuk mempertahankan daya dukung lingkungan, mencegah degradasi lahan, dan mendukung ketahanan terhadap perubahan iklim.

8. Dengan 45% lahan digunakan untuk pertanian dan perkebunan, Cimenyan memiliki potensi untuk pengembangan agribisnis, seperti hortikultura dan tanaman pangan. Selain itu, peternakan skala kecil hingga menengah dapat menjadi pendukung ekonomi lokal, sejalan dengan misi RPJMN untuk swasembada pangan.

2.2.4 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dalam konteks Kecamatan Cimenyan, analisis terhadap hasil KLHS sangat diperlukan mengingat wilayah ini memiliki karakteristik geografis berupa perbukitan, kawasan resapan air, serta menjadi daerah penyangga bagi Kota Bandung. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan Cimenyan harus mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan, meliputi pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, konservasi kawasan hijau, pengendalian alih fungsi lahan, serta mitigasi risiko bencana lingkungan seperti longsor dan banjir. Berdasarkan hasil KLHS Kabupaten Bandung, terdapat beberapa hal strategis yang harus diintegrasikan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Cimenyan, antara lain:

a) Penguatan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah kecamatan, termasuk pengelolaan sampah rumah tangga dan pariwisata, pengendalian limbah domestik, serta pelestarian kawasan hutan dan resapan air.
b) Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan, melalui program edukasi, gotong royong kebersihan, serta pemberdayaan masyarakat untuk

menjaga kawasan hijau di sekitar pemukiman dan lahan pertanian.

c) Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap program pelayanan publik, khususnya terkait tata ruang, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi masyarakat, agar tidak merusak ekosistem alami serta tetap memperhatikan keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

d) Pengelolaan risiko bencana berbasis lingkungan, terutama mitigasi terhadap potensi longsor, banjir bandang, dan penurunan kualitas air tanah, yang harus diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan kecamatan.

Dengan mengintegrasikan temuan dan rekomendasi dari KLHS ke dalam Renstra Kecamatan Cimenyan, diharapkan program dan kebijakan pembangunan dapat berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. Hal ini akan mendukung terciptanya keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan, serta menjadikan Kecamatan Cimenyan sebagai wilayah penyangga ekologis yang tetap lestari dan produktif.

2.2.5 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Cimenyan

Secara umum terdapat permasalahan di Kecamatan Cimenyan adalah masalah pelayanan publik, masalah internal organisasi / Unit Kerja dan masalah perwilayahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan semua pihak, secara rinci permasalahan tersebut sebagai berikut:

Pelayanan Publik

a. Masih adanya sebagaian masyarakat yang belum mampu memperoleh pelayanan kesehatan secara layak;
b. Masih adanya sebagian masyarakat yang masuk dalam katagori keluarga miskin;

c Masih tingginya angka pengangguran karena masih rendahnya tingkat keterampilan;
d. Masih rendahnya daya beli masyarakat;
e. Belum adanya SMU Negeri di wilayah kecamatan Cimenyan;
f. Penanganan masalah sampah yang belum memadai.

.

Internal Organisasi/Unit Kerja:

a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat;
b. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor;
c. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan.

Perwilayahan

a. Kurang tertatanya sarana saluran air/drainase;
b. Kurang tertatanya sarana pemukiman;
c. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat dibidang pariwisata di wilayah kecamatan Cimenyan;
d. Masih kurangnya pengetahuan para petani tentang wawasan pertanian yang ramah/berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan masalah banjir bandang maupun longsor.

4. Peluang

a. Angka putus sekolah dapat di tekan apabila ada sekolah negeri (SMU) yang memadai di wilayah kecamatan Cimenyan;
b. Kejadian bencana alam seperti longsor atau banjir bandang dapat di minimalisasi apabila dapat di tatanya pemukiman, masalah sampah maupun wilayah pertanian;
c. Pelayanan Kesehatan masyarakat dapat optimal apabila adanya sarana RSUD di wilayah kecamatan Cimenyan;

`

d. Peningkatan ekonomi masyarakat dapat di capai dengan pemberdayaan masyarakat yang optimal di bidang pertanian dan pariwisata.

Tabel 2.10 Identifikasi Permasalahan Kecamatan Cimenyan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Fasilitas pelayanan publik belum optimal	Gedung kantor kecamatan sudah tidak memadai	Ruang kerja tidak sesuai dengan kebutuhan
		Ruang pelayanan belum optimal	Masih kurangnya sarana prasarana pendukung ruang pelayanan
		SDM/aparatur kecamatan yang terbatas	Masih kurangnya SDM/Aparatur kecamatan baik kualitas maupun kuantitas
		Kurangnya sarana prasarana pendukung kerja	Terbatasnya anggaran
2.	Sarana prasarana umum belum memadai	Belum adanya fasilitas sosial dan fasilitas umum	Belum adanya alun-alun kecamatan, belum adanya ruang tebuka hijau, belum adanya tempat/sarana olahraga umum
			Sarana jalan beserta PJU belum memadai
			Masih terbatasnya SMP Negeri
			Belum adanya SMU

`

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			dan SMK Negeri
			Belum adanya RSUD
3.	Bencana alam	Sering terjadinya bencana longsor	Alih fungsi lahan
			Kurangnya pemahaman masyarakat tentang mitigasi bencana
			Sulitnya akses untuk penenganan bencana dan pasca bencana

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Cimenyan, 2025

2.2.6 Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dituntut untuk lebih respontif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintah menuju *good governance* and *clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

lsu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan

ruang. lmplikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, sebagai berikut:

1. Membangun sistem pelayanan prima yang aman, cepat, efisien dan transparan;
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas;
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan Masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan Masyarakat.
4. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sesuai dengan kebijakan strategis pemerintah kabupaten Bandung.

lsu-isu strategis berdasarkan tugas dan dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan, akan kehilangan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Cimenyan berdasarkan tugas pokok dan fungsi jabatan, antara lain:

1. Sekretariat Kecamatan
    a. Pembinaan Aparatur/Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan, termasuk juga aparatur di Desa dan Kelurahan;
    b. Pengelolaan asset/barang milik daerah yang baik;

c. Fasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

2. Seksi Pemerintahan
    a. Fasilitasi program dan kegiatan Desa dan Kelurahan;
    b. Pembinaan bidang pemerintahan di Desa dan Kelurahan.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    a. Pembinaan linmas dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan trantibum.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
    a. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
    b. Meningkatkan potensi di bidang pertanian;
    c. Meningkatkan SDM serta Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif;
    d. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan dan pemberdaaan masyarakat;
    e. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan koperasi merah putih.

5. Seksi Pembangunan
    a. Penanganan sampah belum memadai;
    b. Kurang tertatanya sarana saluran air/drainase;
    c. Belum tersedianya sarana fasos dan fasum diwilayah kecamatan Cimenyan;
    d. Belum adanya RSUD diwilayah kecamatan Cimenyan.

6. Seksi Sosial Budaya

a. Belum adanya SMU negeri di wilayah kecamatan Cimenyan;
b. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari pemerintah;
c. Penanganan, penanggulangan bencana dan pasca bencana/tanggap darurat bencana;

`

Tabel 2.11 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Cimenyan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan serta kurangnya SDM	Ketimpangan Infrastruktur di Zona Rawan	Kesenjangan Infrastruktur Digital	Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	Kesenjangan Pendanaan Infrastruktur	Meningkatnya kebutuhan sarana prasarana pendukung dalam pelayanan
Meningkatnya kebutuhan Sarana prasarana umum	Belum adanya fasilitas sosial dan fasilitas umum	Pencemaran dan Sampah dari Pengguna fasilitas	Meningkatnya kebutuhan sarana prasarana dasar seperti air bersih, sanitasi, energi	Penyediaan akses air minum layak, sanitasi, jaringan jalan dan transportasi publik, listrik, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan yang merata.	Meningkatnya kebutuhan lebih besar terhadap jalan lingkungan, jaringan air bersih, drainase, sarana pendidikan, serta fasilitas kesehatan	Pertumbuhan penduduk Kecamatan Cimenyan yang terus meningkat serta posisi strategis sebagai daerah penyangga Kota Bandung menimbulkan tekanan terhadap penyediaan sarana prasarana dasar (jalan, air bersih, sanitasi, sekolah, fasilitas kesehatan).

`

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kesadaran akan Bencana Alam	Sering terjadinya bencana longsor	Ketimpangan Akses di Zona Rawan Bencana	Kesenjangan Data dan Verifikasi	Tingginya angka korban bencana alam	Kurangnya Verifikasi Lapangan terkait potensi bencana alam	Meningkatkan potensi bencana alam di Kecamatan Cimenyan dikarenakan sesar lembang.

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Cimenyan, 2025

`

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

3.1.1 Tujuan

Penentuan tujuan renstra kecamatan Cimenyan yang merupakan penjabaran dari RPJMD kabupaten Bandung tahun 2025-2029 berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) beserta sasaran RPJMD kabupaten Bandung tahun 2025-2029. Saat ini Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Bandung terpilih mempunyai Visi:

"Terwujudnya Kabupaten Bandung Yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas". Berikut penjabaran makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

Lebih Bedas	Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.
Maju	Terwujudnya Kabupaten Bandung Maju memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara

nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga melampaui rata-rata provinsi dan nasional.

Berkelanjutan — Terwujudnya Kabupaten Bandung Berkelanjutan memiliki arti yaitu pembangunan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bandung.

Berdasarkan visi pembangunan yang ada, dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dengan mengacu rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD. Misi pembangunan berikut akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Berikut misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

Misi — Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel;

Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dengan menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan. Dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, diharapkan kebijakan yang diambil akan lebih relevan, tepat sasaran, dan dapat diterima oleh semua pihak. Pemerintah akan menyediakan berbagai forum dan mekanisme/partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk berdialog, menyampaikan aspirasi serta memberikan masukan

secara konstruktif. Selain itu, langkah ini juga mencakup penguatan kapasitas aparatur pemerintah agar lebih responsif, profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan publik.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Transparansi berarti pemerintah membuka akses informasi yang jelas, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga proses dan keputusan yang diambil dapat dipahami dengan baik. Akuntabilitas berarti setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit, serta pemerintah siap memberikan penjelasan jika terjadi penyimpangan atau kesalahan. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat, mendorong partisipasi yang lebih luas, dan pada akhirnya mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Misi pembangunan diatas selanjutnya dijadikan rujukan dalam menyusun kerangka pencapaian misi ke 3, yaitu "Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel". Berdasarkan visi misi kabupaten bandung tersebut, Kecamatan Cimenyan menentukan tujuan jangka menengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang di jabarkan dalam dokumen renstra kecamatan Cimenyan tahun 2025-2029, yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**.**

3.1.2 Sasaran

Sasaran Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung merupakan penjabaran dari tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya

organisasi. Dalam upaya pencapaian tujuan maka ditentukan sasaran yaitu Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan.

`

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cimenyan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0,19	0,22	0,24	0,25	0,26	0,27	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,21	90,41	90,63	90,85	91,09	91,34	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN R) Nomor 14 Tahun 2017

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Cimenyan, 2025

`

3.2 Strategi Kecamatan Cimenyan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Cimenyan Tahun 2025-2029

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Cimenyan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana serta mekanisme pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat	Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat serta membangun pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui peningkatan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui penerapan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat yang berkelanjutan
Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat

`

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
desa/kelurahan melalui pemetaan permasalahan dan potensi lokal	desa/kelurahan dengan mendorong inovasi berdasarkan hasil pemetaan permasalahan dan potensi lokal	desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor	desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor	desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Cimenyan, 2025

3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Cimenyan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Cimenyan Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Cimenyan

No	Sasaran RPJMD yang Relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan berbasis potensi lokal	Peningkatan pelayanan publik yang responsif, adaptif, transparan, akuntabel dan berbasis digital berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Cimenyan, 2025

`

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan diarahkan untuk menjawab permasalahan serta kebutuhan masyarakat secara terukur. Setiap program dan kegiatan disusun berdasarkan prioritas pembangunan yang selaras dengan kebijakan daerah, dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Untuk memastikan ketercapaian sasaran, setiap program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas, target yang terukur, serta pagu indikatif sebagai dasar perencanaan anggaran. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih terarah, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkesinambungan. Uraian mengenai program, kegiatan, dan subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, serta pagu indikatif disajikan pada tabel berikut

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Renstra Kecamatan Cimenyan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN RI Nomor 14 Tahun 2017
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Hasil Maturitas Manajemen Risiko (MR) Perangkat Daerah
				Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Bandung

`

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

`

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Terlaksananya Administrasi BMD	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD yang telah disusun sesuai ketentuan

`

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
							/ Jumlah Dokumen Administrasi BMD yang harus disusun x 100%
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang harus disusun x 100%

`

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

`

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi / Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang harus dipenuhi x 100%
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

`

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang telah disusun / Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang harus disusun x 100%
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik / Jumlah Aset Barang Milik Daerah x 100%
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

`

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
						dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan : Jumlah urusan pemerintahan yang direncanakan x 100%
				Terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan / jumlah kegiatan yang direncanakan yang tidak

`

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
						Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan x 100%
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Terselenggaranya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terlaksana / jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
				Terselenggaranya urusan pelimpahan kepada camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana / Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang direncanakan x 100%

`

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
			Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina / Jumlah Keseluruhan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan x 100%
				Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana / Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang direncanakan x 100%
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Forum Musyawarah dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

`

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
				Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi dan Dibina / Jumlah fasilitasi dan pembinaan Lembaga kemasyarakatan yang direncanakan x 100%
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
				Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan / Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya	7.01.03.2.06.0001 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan

`

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
				Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
				Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	7.01.03.2.06.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

`

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
				Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	7.01.03.2.06.0001 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
				Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	7.01.03.2.06.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat	7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat

`

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
				Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
				Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
				Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
			Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi		Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah koordinasi penegakkan perda yang berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan / Jumlah koordinasi penegakkan perda yang direncanakan berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan x 100%

`

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
			masyarakat yang tenteram dan tertib				
				Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana / Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
				Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
				Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

`

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
			Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib		Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah koordinasi penegakkan perda yang berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan / Jumlah koordinasi penegakkan perda yang direncanakan berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan x 100%
				Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana / Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100%
							Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

`

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
						dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
				Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan		Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa / Jumlah perencanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa

`

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
				Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dan diawasi / Total jumlah desa x 100%
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.01.06.2.01.0006 -Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Sumber: SIPD Renstra Kecamatan Cimenyan, 2025

`

Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
7.01 - KECAMATAN				14.290.085.447		13.522.537.000		13.624.093.000		13.675.485.250		13.871.132.650	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.181.381.000		7.181.381.000		7.181.381.000		7.181.381.000		7.181.381.000	S.3.1
Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah (Poin)	37,48	39	7.181.381.000	40	7.181.381.000	41	7.181.381.000	42	7.181.381.000	43	7.181.381.000	
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	0	61,2		61,4		61,6		61,8		62		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19.500.000		19.500.000		19.500.000		19.500.000		19.500.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	19.500.000	1	19.500.000	1	19.500.000	1	19.500.000	1	19.500.000	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	2	4.500.000	2	4.500.000	2	4.500.000	2	4.500.000	2	4.500.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.462.601.000		6.462.601.000		6.462.601.000		6.462.601.000		6.462.601.000	
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	6.462.601.000	1	6.462.601.000	1	6.462.601.000	1	6.462.601.000	1	6.462.601.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	30		30		30		30		30		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.453.601.000		6.453.601.000		6.453.601.000		6.453.601.000		6.453.601.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	30	6.453.601.000	30	6.453.601.000	30	6.453.601.000	30	6.453.601.000	30	6.453.601.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)												
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Terlaksananya Administrasi BMD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	
7.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Persentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
7.01.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	30	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30	30		30		30		30		30		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	30	30		30		30		30		30		

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	30	30	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	30	30	1.500.000	30	1.500.000	30	1.500.000	30	1.500.000	30	1.500.000	
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				13.500.000		13.500.000		13.500.000		13.500.000		13.500.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30	30	13.500.000	30	13.500.000	30	13.500.000	30	13.500.000	30	13.500.000	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				72.500.000		72.500.000		72.500.000		72.500.000		72.500.000	
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12	72.500.000	12	72.500.000	12	72.500.000	12	72.500.000	12	72.500.000	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12		

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12	12	7.500.000	12	7.500.000	12	7.500.000	12	7.500.000	12	7.500.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)												
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	14.000.000	12	14.000.000	12	14.000.000	12	14.000.000	12	14.000.000	
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				42.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000	
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4	42.000.000	4	42.000.000	4	42.000.000	4	42.000.000	4	42.000.000	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	3		3		3		3		3		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4	27.000.000	4	27.000.000	4	27.000.000	4	27.000.000	4	27.000.000	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				449.000.000		449.000.000		449.000.000		449.000.000		449.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	449.000.000	12	449.000.000	12	449.000.000	12	449.000.000	12	449.000.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12	12		12		12		12		12		

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	dan Listrik yang Disediakan (Laporan)												
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				48.000.000		48.000.000		48.000.000		48.000.000		48.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	48.000.000	12	48.000.000	12	48.000.000	12	48.000.000	12	48.000.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				396.000.000		396.000.000		396.000.000		396.000.000		396.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	396.000.000	12	396.000.000	12	396.000.000	12	396.000.000	12	396.000.000	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				97.780.000		97.780.000		97.780.000		97.780.000		97.780.000	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	97.780.000	3	97.780.000	3	97.780.000	3	97.780.000	3	97.780.000	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	6	6		6		6		6		6		

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)												
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				78.280.000		78.280.000		78.280.000		78.280.000		78.280.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6	78.280.000	6	78.280.000	6	78.280.000	6	78.280.000	6	78.280.000	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.500.000		14.500.000		14.500.000		14.500.000		14.500.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	14.500.000	3	14.500.000	3	14.500.000	3	14.500.000	3	14.500.000	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				584.830.179		217.634.000		415.190.000		450.582.250		662.229.650	S.3.1
Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat (%)	70,97	74	584.830.179	76	217.634.000	78	415.190.000	80	450.582.250	82	662.229.650	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah													
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				16.500.000		16.500.000		16.500.000		16.500.000		16.500.000	
Terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	16.500.000	12	16.500.000	12	16.500.000	12	16.500.000	12	16.500.000	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				16.500.000		16.500.000		16.500.000		16.500.000		16.500.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	16.500.000	12	16.500.000	12	16.500.000	12	16.500.000	12	16.500.000	
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	
Terselenggaranya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	1	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau				7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum													
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	1	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				561.330.179		194.134.000		391.690.000		427.082.250		638.729.650	
Terselenggaranya urusan pelimpahan kepada camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	4	21	561.330.179	4	194.134.000	4	391.690.000	4	427.082.250	4	638.729.650	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				561.330.179		194.134.000		391.690.000		427.082.250		638.729.650	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	4	21	561.330.179	4	194.134.000	4	391.690.000	4	427.082.250	4	638.729.650	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				6.335.352.268		5.839.000.000		5.839.000.000		5.839.000.000		5.839.000.000	S.3.1
Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina (%)	93,8	94,2	6.335.352.268	94,4	5.839.000.000	94,6	5.839.000.000	94,8	5.839.000.000	95	5.839.000.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat													
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)												
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				6.260.352.268		5.764.000.000		5.764.000.000		5.764.000.000		5.764.000.000	
Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	10	10	6.260.352.268	10	5.764.000.000	10	5.764.000.000	10	5.764.000.000	10	5.764.000.000	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	10	10		10		10		10		10		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	2	2		2		2		2		2		

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)												
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	21	2		2		2		2		2		
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				4.300.067.455		3.962.000.000		3.962.000.000		3.962.000.000		3.962.000.000	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	10	10	4.300.067.455	10	3.962.000.000	10	3.962.000.000	10	3.962.000.000	10	3.962.000.000	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.856.284.813		1.698.000.000		1.698.000.000		1.698.000.000		1.698.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	10	10	1.856.284.813	10	1.698.000.000	10	1.698.000.000	10	1.698.000.000	10	1.698.000.000	
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	21	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1		1		1		1		1		

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	120	120	40.000.000	120	40.000.000	120	40.000.000	120	40.000.000	120	40.000.000	
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan	0	0		0		0		0		0		

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)												
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	0	0		0		0		0		0		
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	
7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	
7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	120	120	10.000.000	120	10.000.000	120	10.000.000	120	10.000.000	120	10.000.000	
Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat				0		0		0		0		0	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	S.3.1
Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (%)	97,18	97,6	30.000.000	97,8	30.000.000	98	30.000.000	98,2	30.000.000	98,4	30.000.000	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Terselenggaranya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)												
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Negara Republik Indonesia (Laporan)												
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				67.522.000		67.522.000		67.522.000		67.522.000		67.522.000	S.3.1
Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	41,88	42,2	67.522.000	42,4	67.522.000	42,6	67.522.000	42,8	67.522.000	43	67.522.000	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				67.522.000		67.522.000		67.522.000		67.522.000		67.522.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	45	45	67.522.000	45	67.522.000	45	67.522.000	45	67.522.000	45	67.522.000	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	45	45		45		45		45		45		
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				32.522.000		32.522.000		32.522.000		32.522.000		32.522.000	
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	45	45	32.522.000	45	32.522.000	45	32.522.000	45	32.522.000	45	32.522.000	
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas				17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	45	45	17.000.000	45	17.000.000	45	17.000.000	45	17.000.000	45	17.000.000	
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				91.000.000		187.000.000		91.000.000		107.000.000		91.000.000	S.3.1
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan	Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa (%)	42,56	42,9	91.000.000	43,1	187.000.000	43,3	91.000.000	43,5	107.000.000	43,7	91.000.000	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				91.000.000		187.000.000		91.000.000		107.000.000		91.000.000	
Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan			91.000.000	1	187.000.000		91.000.000	1	107.000.000		91.000.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)												
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0		96.000.000		0		16.000.000		0	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)			0	1	96.000.000		0	1	16.000.000		0	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				51.000.000		51.000.000		51.000.000		51.000.000		51.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	1	51.000.000	1	51.000.000	1	51.000.000	1	51.000.000	1	51.000.000	
7.01.06.2.01.0012 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	

`

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)												
7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	

Sumber: SIPD Renstra, 2025

Ket:

S.3.1 = Program yang Mendukung Sasaran KDH: Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisisen

`

4.2 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, diperlukan penetapan subkegiatan prioritas yang secara langsung berkontribusi terhadap pelaksanaan program prioritas pembangunan. Subkegiatan prioritas ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, arah kebijakan pembangunan daerah, serta keterkaitan dengan visi dan misi kepala daerah.

Penetapan subkegiatan prioritas dimaksudkan agar penggunaan sumber daya dapat lebih terfokus, efektif, dan memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap subkegiatan dipilih berdasarkan urgensi, relevansi dengan isu strategis daerah, serta kemampuan dalam memberikan dampak nyata terhadap pembangunan.

Daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3	Program Penyelenggaraan	Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi)	

`

No.	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Urusan Pemerintahan Umum	Urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Cimenyan, 2025

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cimenyan Tahun 2025-2029 melalui IKU Kecamatan Cimenyan

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, serta arah pembangunan Kecamatan Cimenyan, diperlukan ukuran keberhasilan yang jelas dan terukur. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Cimenyan Tahun 2025–2029 dituangkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan, yang berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai efektivitas, efisiensi, serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Penetapan IKU ini bertujuan untuk memastikan setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan adanya target yang terukur, capaian kinerja Kecamatan Cimenyan dapat dievaluasi secara periodik dan menjadi dasar dalam perbaikan maupun penyusunan kebijakan di masa mendatang.

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Cimenyan Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Utama disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cimenyan

`

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	0,19	0,22	0,24	0,25	0,26	0,27	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Cimenyan, 2025

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Dalam rangka mengukur capaian pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan, diperlukan indikator yang lebih operasional pada tingkat perangkat daerah. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berfungsi sebagai instrumen untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan, baik dalam aspek pelayanan publik maupun tata kelola pemerintahan di Kecamatan Cimenyan.

Penetapan target kinerja melalui IKK bertujuan untuk memastikan setiap urusan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan adanya target yang terukur, pelaksanaan tugas Kecamatan dapat dipantau secara berkala, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kecamatan Cimenyan Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada tabel berikut:

`

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Cimenyan

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	0,19	0,22	0,24	0,25	0,26	0,27	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Cimenyan, 2025

`

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari dokumen Renstra merupakan ringkasan inti yang mencerminkan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta strategi pencapaian tujuan suatu instansi atau pemerintah daerah dalam periode lima tahunan. Renstra menjadi dokumen fundamental yang mengarahkan semua program dan kegiatan agar berjalan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan visi-misi yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, dokumen Renstra merupakan peta jalan strategis yang menuntun Kecamatan agar berjalan dalam jalur yang sesuai dengan visi misi Kabupaten Bandung. Renstra menjembatani antara harapan masyarakat, kebijakan pemerintah, dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, kesimpulan substansial dari Renstra tidak hanya terletak pada isi perencanaan, tetapi juga pada komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui perencanaan yang terukur dan partisipatif.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman bagi Kecamatan Cimenyan serta para pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun ke depan.

Kaidah pelaksanaan berfungsi sebagai panduan utama agar kegiatan dapat dijalankan secara sistematis, akuntabel, dan terarah. Tanpa kaidah yang jelas, pelaksanaan program atau kegiatan rawan mengalami deviasi dari rencana awal, menimbulkan inefisiensi, dan gagal memenuhi harapan publik. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan kaidah pelaksanaan yang baik sangat krusial dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan. Adapun pelaksanaannya berlandaskan prinsip-prinsip berikut:

1. Kecamatan Cimenyan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Bandung harus berkontribusi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
2. Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung harus menjalankan program-program yang telah tercantum dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya.

`

Setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ditetapkan, Kecamatan Cimenyan wajib menyusun Renstra SKPD yang mengacu pada dokumen RPJMD.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Dalam proses penyusunan Renstra, pelaksanaan pengendalian serta evaluasi terhadap perencanaan dan implementasinya merupakan langkah penting yang tidak dapat diabaikan. Hal ini dimaksudkan agar dokumen yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan di lapangan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan adanya konsistensi antara kebijakan strategis dengan hasil pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian kinerja jangka menengah Kecamatan Cimenyan. Melalui evaluasi tersebut dapat diukur tingkat keberhasilan Kecamatan Cimenyan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pengendalian dan evaluasi difokuskan pada perumusan kebijakan strategis, pelaksanaan program pembangunan daerah, serta penilaian terhadap hasil yang dicapai sesuai kewenangan Kecamatan Cimenyan. Evaluasi Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan sebagai bentuk pemantauan dan supervisi, sehingga sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang termuat dalam Renstra Kecamatan Cimenyan Tahun 2025–2029 tetap terjaga keberlanjutannya. Evaluasi juga berfungsi memastikan bahwa visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung yang tertuang dalam RPJMD benar-benar dijalankan melalui Renstra-PD Kecamatan Cimenyan sesuai dengan peran dan fungsinya. Dari hasil evaluasi tersebut dapat dikenali faktor-faktor pendorong maupun penghambat kinerja yang kemudian menjadi bahan perbaikan untuk perencanaan strategis pada periode selanjutnya.

Adapun fokus utama dalam evaluasi Renstra Kecamatan Cimenyan mencakup:

1. Penilaian terhadap capaian pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan Cimenyan;
2. Analisis kinerja berdasarkan indikator, baik Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator pendukung;

`

3. Kajian terhadap capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan;
4. Identifikasi faktor pendorong dan hambatan yang memengaruhi capaian kinerja.

Renstra Kecamatan Cimenyan Tahun 2025–2029 berisi arah kebijakan, tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, serta program strategis yang dirancang secara sistematis untuk menjawab isu-isu strategis, khususnya dalam memperkuat peran Kecamatan sebagai simpul koordinasi pelayanan publik kewilayahan yang terpadu dan berkesinambungan. Sebagai dokumen perencanaan strategis, Renstra-PD tidak hanya menjadi pedoman internal Kecamatan Cimenyan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya, tetapi juga berfungsi sebagai referensi dalam proses pengambilan keputusan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah desa, perangkat daerah teknis, lembaga masyarakat, maupun mitra pembangunan lainnya.

Dengan demikian, Renstra Kecamatan Cimenyan Tahun 2025–2029 diharapkan mampu meningkatkan kinerja aparatur, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta menjadi pedoman utama dalam penyusunan Renja Kecamatan Cimenyan pada setiap tahunnya.

Soreang, September 2025
CAMAT CIMENYAN

Ttd

SOLIHIN

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

`

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pegawai Kecamatan Cimenyan berdasarkan Jenis kelamin	24
Tabel 2.2	Pegawai Kecamatan Cimenyan berdasarkan Golongan	24
Tabel 2.3	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan	25
Tabel 2.4	Pegawai Kecamatan Berdasarkan Jabatan dan Golongan Eselon	25
Tabel 2.5	Hasil Rekonsiliasi Aset Triwulan II Tahun 2025	27
Tabel 2.6	Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	30
Tabel 2.7	Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cimenyan Tahun 2021-2026	33
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung	36
Tabel 2.9	Realisasi Program dan Kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja Tahun 2021-2024	42
Tabel 2.10	Identifikasi Permasalahan Kecamatan Cimenyan	62
Tabel 2.11	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Cimenyan	67
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cimenyan	73
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Kecamatan Cimenyan	74
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Cimenyan	75
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Renstra Kecamatan Cimenyan	77
Tabel 4.2	Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan	95
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	144
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cimenyan	146
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Cimenyan	147

`

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan 18